

ABSTRAK

Aqmul Darul Aqza, 2023 “Peranan Paralegal dalam sistem Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Makassar” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, IAIN Palopo, Pembimbing I Hj. Anita Marwing dan Pembimbing II Wawan Haryanto.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin perlakuan yang sama dihadapan hukum yang erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Akan tetapi, pada kenyataannya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah atas hak bantuan hukum membuat permasalahan hukum dan kriminalisasi terhadap berbagai kelompok masyarakat kecil, miskin dan rentan masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Bantuan Hukum di YLBHI-LBH Makassar dan Peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data kemudian diolah menggunakan teknik reduksi data dan analisis deduktif serta induktif, selanjutnya data disajikan secara deskriptif untuk penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Hukum Struktural merupakan formulasi khusus dan strategi pemberian pelayanan bantuan hukum *Inklusif* berlandaskan Hak Asasi Manusia akibat ketimpangan struktural masyarakat. Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum, YLBHI-LBH Makassar mengacu kepada UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Paralegal sangat membantu YLBHI-LBH Makassar dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat wilayah Sulawesi Selatan terhadap bantuan hukum, terutama di daerah yang masih minim pemahaman dan akses bantuan hukum berkualitas, karena akan menghemat waktu dan biaya pendampingan yang nominal penganggarnya yang terbatas. Selain itu paralegal juga akan menjadi pijakan pertama untuk proses penyelesaian sebuah kasus dan jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan *aces to justice* yang layak. Paralegal dapat membantu YLBHI-LBH Makassar dalam melakukan pendampingan *litigasi* maupun *non- litigasi*.

Kata kunci: Paralegal, Peran, Bantuan Hukum Struktural, YLBHI-LBH Makassar.

ABSTRACT

Aqmul Darul Aqza, 2023 "The Role of Paralegals in the Legal Aid System of Indonesian Legal Aid Institute Foundation LBH Makassar" Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Palopo, Supervisor I Hj. Anita Marwing and Supervisor II Wawan Hariyanto.

The 1945 Constitution has guaranteed equal treatment before the law which is closely related to the right to legal aid. However, in reality, the low awareness and understanding of public law on the right to legal aid makes legal problems and criminalisation of various groups of small, poor and vulnerable communities still occur frequently. This study aims to find out how the implementation of the Legal Aid System at YLBHI LBH Makassar and the Role of Paralegals in providing legal aid. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach. Data is obtained from observations, interviews and documentation. The data is then processed using data reduction techniques and deductive and inductive analysis, then the data is presented descriptively to draw conclusions. The results showed that Structural Legal Aid is a special formulation and strategy for providing inclusive legal aid services based on human rights due to structural inequality in society. In providing legal aid services, YLBHI-LBH Makassar refers to Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid and Government Regulation No. 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distributing Legal Aid Funds. Paralegals are very helpful to YLBHI-LBH Makassar in accommodating the needs of the people of the South Sulawesi region for legal aid, especially in areas that still lack understanding and Quality legal aid. because it will save time and the cost of assistance, which has a limited budget. In addition, paralegals will also be the first step in the process of resolving a case and a bridge for the community to get proper access to justice. Paralegals can assist YLBHI-LBH Makassar in providing litigation and non-litigation assistance.

Kata kunci: *Paralegal, Role, Structural Legal Aid, YLBHI-LBH Makassar*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan hukum di Indonesia dari masa ke masa seharusnya sejajar dengan penguatan layanan dalam pemberian akses keadilan dan berbagai bentuk pendampingan hukum lainnya sesuai dengan konstitusi negara. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dijamin melalui UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 D ayat 1 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.¹

Ramly Hutabarat menjelaskan, teori *equality before the law* dalam UUD 1945 merupakan sesuatu mata rantai antara hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan kostruk dan tanggung jawab masing-masing. Asas *equality before the law* memiliki arti tiap masyarakat negeri wajib diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum serta pemerintah. Lebih lanjut, ia menarangkan, ditinjau dari hukum tata negara hingga tiap lembaga pemerintah, utamanya aparat

¹ Hakki Fajriando, "Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum," *Jurnal Ham*, volume 11, nomor 3. (Desember 2020): 468, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.467-486>. Diakses September 2022.